

TNI akan Bangun 22 Kodam Baru, Salah Satunya Berada di IKN

JAKARTA (IM) - Tentara Nasional Indonesia (TNI) akan membangun 22 Kodam baru satu di antaranya ada di Ibu Kota Negara (IKN) sehingga total jumlah Kodam di seluruh Indonesia menjadi 37. Saat ini baru ada 15 Kodam.

Sebelumnya beredar berita seolah-olah ada penambahan 37 Kodam Baru.

"Menanggapi beredar berita terkait rencana penambahan Kodam, beberapa berita membuat masyarakat salah menafsirkan," ujar Kapuspen TNI Mayjen TNI Dr. Nugraha Gumilar di Kantor Puspen TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, Kamis (29/2).

Berita tersebut menggambarkan seolah-olah TNI akan menambah 37 Kodam baru, hal tersebut merupakan salah mengartikan dari rencana TNI yang akan menambah jumlah Kodam yang akan diimplementasikan secara bertahap.

Kapuspen TNI meluruskan agar masyarakat tidak salah menafsirkan terkait rencana TNI (TNI

AD) yang akan menambah jumlah Kodam yang akan di gelar di seluruh wilayah Indonesia termasuk di Ibu Kota Negara (IKN).

"Yang benar menambah menjadi 37 dari sebelumnya 15 Kodam, jadi penambahannya 22 Kodam," ujar Nugraha.

Sebelumnya, Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto mengatakan, pihaknya berencana membangun 22 Komando Daerah Militer (kodam), satu di antaranya ada di wilayah Ibu Kota Nusantara (IKN).

Hal itu diungkapkan Agus Subiyanto dalam Rapat Pimpinan (Rapim) TNI-Polri di GOR Ahmad Yani Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, Rabu (28/2).

"TNI AD rencana akan membangun dan menggelar 37 Kodam. Di mana dari 37 Kodam yang akan digelar, 15 Kodam diperkuat dengan Korem sedangkan 22 Kodam tanpa Korem di bawahnya termasuk pembangunan Kodam di IKN dan 2 Batalion baru," katanya. ● han

Perolehan Suara Resmi Pemilu Ditentukan secara Berjenjang

JAKARTA (IM) - Komisi Pemilihan Umum (KPU) menegaskan bahwa hasil resmi perolehan suara peserta Pemilu ditentukan berdasarkan hasil rekapitulasi secara berjenjang yang dilakukan dimulai dari BPK sampai dengan KPU RI.

Komisiner KPU, Idham Holik menyebut bahwa aplikasi Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap) merupakan alat bantu yang digunakan KPU untuk mempublikasikan foto formulir model C hasil Plano.

"Kalau kemarin dalam Konferensi pers ketua KPU RI menyampaikan ada hasil koreksi terhadap tampilan publik hasil pembacaan Sirekap itu bukti bahwa KPU memang jujur ya. KPU jujur dan KPU tidak pernah merubah foto formulir model C hasil plano, nah jadi dengan demikian Sirekap hadir ini sebenarnya ingin menyampaikan hasil pemilu yang ada di TPS dan saat ini PPK sebentar lagi tanggal 2 akan menyelesaikan proses rekapitulasinya," terangnya kepada wartawan, Kamis (29/2).

Idham Holik juga memastikan bahwa data-data berdasarkan hasil pembacaan terhadap dokumen Sirekap itu sudah diakurasi. Sehingga, tampilan perolehan suara peserta pemilu sekarang sesuai dengan apa yang terdapat di dalam foto formulir model C hasil Plano.

"Foto formulir model C hasil Plano ya itu difoto di depan para saksi, penulisan formulir model C hasil Plano itu berdasarkan pada perolehan suara partai politik peserta pemilu berdasarkan hasil pembacaan perolehan suara yang disampaikan oleh ketua KPSS dengan cara menteli 1 per satu," urai Idham.

Berkendaraan dengan foto formulir yang tidak terbaca, Idham bilang, pihaknya akan segera mengkoordinasikan h ini dengan KPU di daerah agar mengkonfirmasi kepada KPSS yang bersangkutan.

"Saat ini semua dokumen ya berkaitan dengan hasil perolehan suara itu sedang direkapitulasi di tingkat kecamatan," tandasnya. ● mei



FOTO: ANT

LOMBA MENEMBAK SENAPAN SERBU

Prajurit Korps Marinir TNI AL menembak sasaran dengan Senapan Serbu 2 (SS-2) saat lomba menembak di Lapangan tembak Brigif 2 Marinir, Gedangan, Sidoarjo, Jatim, Kamis (29/2). Lomba diikuti 40 peserta dan bertujuan untuk meningkatkan kemampuan personel dan mengukur ketangkasan prajurit dalam menggunakan senapan serbu.

Kuli Bangunan Pelaku Pembunuhan Dosen UIN Solo Dihukum Seumur Hidup

SUKOHARJO (IM) - Dwi Feriyanto (23), kuli bangunan, peaku pembunuhan terhadap dosen UIN Raden Mas Said Solo, Wahyu Dian Silvia, dihukum penjara seumur hidup. Hakim menilai terdakwa terbukti secara sah melanggar Pasal 340 KUHP.

Vonis dibacakan dalam sidang di Pengadilan Negeri (PN) Sukoharjo yang dipimpin oleh majelis hakim ketua Deni Indrayana serta hakim anggota Emma Sri Setyowati dan Yesi Akhista, Kamis (29/2).

"Mengadili, terdakwa Dwi Feriyanto terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pembunuhan berencana, sebagaimana dalam dakwaan ke satu primer. Menjatuhkan

hukuman terhadap terdakwa Dwi Feriyanto dengan pidana seumur hidup," kata Deni saat membacakan putusan majelis hakim di PN Sukoharjo, Kamis (29/2).

Sejumlah barang bukti akan disita untuk dimusnahkan. Sedangkan sejumlah barang bukti, seperti laptop dan HP korban, dikembalikan kepada ahli waris korban.

Karena terdakwa divonis seumur hidup, biaya perkara akan dibebankan kepada negara.

"Demikian putusan ini, saudara penuntut umum maupun penasihat hukum miliki hak terhadap putusan ini, baik menerima atau mengajukan pikir-pikir," ucapnya. ● mei

2 | Polhukam

FOTO: ANTARA



OPEN BASE DAN STATIC SHOW PANGKALAN TNI AU HANG NADIM

Warga melihat pesawat tempur Hawk 100/200 saat Open Base dan Static Show di Pangkalan TNI AU Hang Nadim, Batam, Kepri, Kamis (29/2). Acara yang menampilkan tiga pesawat tempur Hawk 100/200 dan helikopter Super Puma tersebut digelar dalam rangka memberikan edukasi kepada masyarakat tentang alutsista TNI AU.

Kecurangan Pemilu Selalu Dituding ke 02, Mungkin Juga Dilakukan Kubu 01 dan 03

Sejumlah platform telah tersedia bagi pihak-pihak yang merasa Pilpres 2024 ada kecurangan. Hal itu bisa dilaporkan ke Bawaslu hingga MK.

JAKARTA (IM) - Wakil Ketua Umum (Waketum) Partai Amanat Nasional (PAN) Yandri Susanto tidak ingin hanya pihaknya yang menjadi tertuduh dalam dugaan kecurangan Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.

Diketahui, PAN adalah salah satu partai politik yang tergabung dalam barisan pengusung pasangan calon presiden dan calon wakil presiden (capres-cawapres) nomor urut 2, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

"Karena itu, kalau pun

ada kecurangan, ya jangan juga kecurangan itu seolah dituding kepada kami. Ya mungkin juga (kubu) 01, 03 ada kecurangan," kata Yandri dalam program Satu Meja The Forum yang ditayangkan Kompas TV, Rabu (28/2) malam.

Yandri lantas menyebut sejumlah platform sudah tersedia bagi pihak-pihak yang merasa Pilpres 2024 berjalan tidak semestinya. Dugaan kecurangan itu bisa dilaporkan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) hingga Mahkamah

Konstitusi (MK).

"Nah, maka kalau pun ada kecurangan, saya kira kanal-kanal demokrasi kita ini sudah ada," ujar Yandri.

"Kalau dalam proses ada pelanggaran bisa ke Bawaslu, atau Gakkumdu (sentra penegakan hukum terpadu). Kalau nanti ada selisih persoalan hasil, itu kan ada MK," kata Yandri yang kini menjabat sebagai Wakil Ketua MPR.

Yandri juga menyebut DPR bisa menjadi jalan politik untuk mengevaluasi proses pelaksanaan pemilihan umum (Pemilu) 2024, tetapi tidak rasional untuk hak angket. Pasalnya prosesnya akan memakan waktu panjang yang diperkirakan tidak akan selesai dalam periode anggota DPR saat ini.

Ia mencontohkan, DPR bisa mengevaluasi pihak penyelenggara Pemilu seperti Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI dan Bawaslu. Begitu juga dengan TNI maupun Polri yang memiliki mitra kerja di DPR pada komisi yang berbeda, jika memang dua institusi ini dianggap tidak netral dalam Pemilu 2024.

"Masalahnya kalau (hak) angket, kalau secara rasional menurut saya tidak mungkin. Tidak mungkin karena dari waktu teknis, sekarang DPR belum masuk (masih reses).

Baru akan masuk tanggal 5 Maret. 5 Maret ini ya awal masuk itu menyusun agenda, enggak tahu apakah mereka ini betul-betul mengusulkan hak angket, kan minimal 25 orang dari fraksi yang berbeda. Kemudian, akan diajukan ke badan musyawarah pimpinan," ujar Yandri.

"Di situ (Bamus pimpinan) juga mungkin akan ada perdebatan. Kalau disetujui mungkin, akan dibawa ke paripurna. Paripurna kita juga belum tahu petanya," katanya lagi. ● han

Wamenhan Pastikan Perbanyak Pengadaan Drone untuk TNI

JAKARTA (IM) - Wakil Menteri Pertahanan (Wamenhan), Muhammad Herindra, memastikan akan memperbanyak pengadaan drone bagi TNI. Dia berharap ke depan Indonesia bisa membuat sendiri drone.

Herindra menyebut drone sudah menjadi perhatian dari Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan hal ini sempat disinggung Kepala Negara dalam Rapim TNI-Polri di Mabes TNI, Rabu (28/2).

Presiden Jokowi dalam sambutannya di Rapim TNI-Polri meminta agar dua instansi tersebut lebih berani masuk ke hal-hal yang berkaitan dengan teknologi, termasuk penggunaan drone.

"Pasti (diperbanyak drone), pasti. Itu menjadi atensi Pak Presiden kemarin. Kita cari-cari sumber drone yang bagus lah ya, kan banyak di pasar. Tentunya ke depan kita harus buat sendiri. Karena sekali lagi, untuk memperkuat sebuah pertahanan negara itu yang paling bisa kita gunakan juga harus juga memperkuat industri pertahanan dalam negeri," kata Herindra kepada wartawan di Gedung Puri Ardhya Garini, Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Kamis (29/2).

Ia menyebut bahwa kekuatan pertahanan udara Indonesia saat ini sudah lengkap. Kekuatan drone yang menjadi bentuk kemajuan dunia pertahanan bakal menambah kekuatan dari TNI.

"Saya pikir di udara semua sudah, semua sudah tergabung lah. Kita kan sudah secara komprehensif, holistik, integral. Kekuatan macam-macam ya, ada kekuatan mulai dari radar, pesawat tempurnya, kemudian juga kemarin drone. Drone ini adalah satu revolusi dalam bidang pertahanan, dalam dunia perang. Itu menjadi juga titik perhatian kita untuk mengadakan drone," ujar Herindra.

"Kita yakin bahwa ke depan angkatan udara kita akan semakin kuat dan kita harapkan udara juga siap menyiapkan SDM-nya dan apa yang sudah menjadi kebijakan Kemhan dapat langsung terlaksana di tingkat bawah," ujarnya.

Sejauh ini kekuatan yang ada di TNI AU sudah bagus. Herindra menyebut sudah berbincang dengan Kepala Staf Angkatan Udara (KSAU) Marskal TNI Fadjar Prasetyo dalam menyempurnakan kekuatan TNI AU.

"Saya pikir bagus, tinggal nanti kita menyempurnakan lah. Bahkan tadi Pak KSAU sudah ada ide-ide yang mungkin belum akan saya sampaikan di sini, nanti tanyakan Pak KSAU," ujarnya.

Seperti diketahui, dalam Rapim TNI-Polri di Mabes TNI, Presiden Jokowi bicara mengenai pentingnya teknologi dalam berperang. Jokowi meminta TNI-Polri mengikuti perkembangan teknologi dunia dalam menjaga pertahanan negara.

"Pemanfaatan teknologi dalam perang konvensional, perang cyber akan semakin meningkat. Oleh sebab itu, TNI, Polri, harus berani masuk ke hal-hal yang berkaitan dengan teknologi, pesawat tempur perlu, iya, tank perlu, iya, tapi hati-hati juga dengan drone," kata Jokowi saat sambutan di Rapim TNI-Polri 2024 di Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta, Rabu (28/2).

Jokowi mengatakan penggunaan drone saat ini kian canggih. Dia mencontohkan peristiwa penembakan Komandan Pasukan Quds Garda Revolusi Iran, Mayor Jenderal Qasem Soleimani.

"Saya ingat tahun 2020 Januari, ada penggunaan drone yang saya kaget karena begitu sangat presisi dan sangat akurat mengejar siapa yang diinginkan. Saat itu Mayjen Soleimani ini komandan Quds dari Pengawal Besar Revolusi Iran, ketembak dari drone yang dipersenjatai, akurat karena pakai face recognition, akhirnya ketembak, dan kita kaget itu terjadi di wilayah Irak tapi drone-nya konon dikendalikan dari wilayah Qatar, markas Amerika Serikat di Qatar," ucap Jokowi.

"Ini hal-hal yang harus kita ikuti, kita amati, bagaimana perkembangan teknologi bisa mengubah dari perang konvensional ke perang yang bisa dikendalikan dari jarak jauh," ucapnya. ● mei

Terungkap, Tahanan Sogok Pegawai KPK Rp10-20 Juta untuk Pakai HP dalam Rutan

JAKARTA (IM) - Dewan Pengawas (Dewas) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menetapkan jadwal sidang dugaan pelanggaran etik terhadap tiga pegawai komisi antirasuah tersebut terkait pungli di rutan.

Diketahui, tiga orang tersebut merupakan tiga orang terakhir dari total 93 pegawai KPK yang terjerat perkara pungli rumah tahanan (rutan).

Anggota Dewas KPK, Albertina Ho menjelaskan, sidang etik terhadap tiga pegawai KPK tersebut rencananya digelar pada pertengahan bulan Maret 2024 mendatang.

"Rencana mulai 13 Maret," kata Albertina kepada wartawan, dikutip Kamis, (29/2).

Sebelumnya, Dewas

KPK telah menggelar sidang dan memvonis terhadap 90 pegawai. 78 dari jumlah tersebut, dijatuhi sanksi berat dan diberikan hukuman moral untuk meminta maaf secara langsung terbuka.

Hukuman tersebut pun sudah dilakukan di hadapan Sekretaris Jenderal KPK, Cahya H. Harefa dan insan KPK lainnya.

Nantinya video permintaan maaf tersebut pun akan diunggah ke media internal KPK dan bisa disaksikan oleh semua pegawai komisi antirasuah sebagai pengingat agar tak melakukan hal serupa.

Sekadar informasi, dalam pungli tersebut ditunjukkan agar para tahanan KPK mendapatkan fasilitas tambahan, contohnya menyelundupkan hp dan

mendapat makanan di luar jam yang telah ditentukan.

Untuk HP, para tahanan dikenai biaya Rp10-20 juta sebagai uang awal. Kemudian perbulannya, dikenai setidaknya Rp5 juta. Bahkan, untuk setiap pengisian daya baterai hp, dikenai biaya ratusan ribu.

Meski tidak disebutkan secara detail, jumlah tersangka dalam perkara ini lebih dari 10 orang.

Sejalan dengan itu, KPK pun melakukan pengeledahan di tiga rutan cabang KPK, yang terdiri dari Rutan di gedung Merah Putih KPK, Rutan di Pomdam Jaya Guntur, dan Rutan yang berada di gedung ACLC.

Dalam pengeledahan tersebut, KPK mengamankan dokumen terkait catatan penerimaan uang terkait pungli di rutan. ● han



FOTO: ANT

PEMUSNAHAN BARANG BUKTI TINDAK PIDANA DI PALU

Petugas membakar barang bukti tindak pidana di halaman Kantor Kejaksaan Negeri Palu, Sulteng, Kamis (29/2). Kejaksaan Negeri Palu memusnahkan sejumlah barang bukti tindak pidana dari 48 perkara mulai dari narkoba jenis sabu beserta perlengkapannya, pisau, kunci, kartu ATM, telepon genggam, kertas ramalan judi, hingga dispenser pompa ukur BBM.